

TESIS

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA/BURUH *OUTSOURCING*
DI KOTA YOGYAKARTA**



MANUEL MARTINS
No. Mhs.: 115201586/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2013**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : MANUEL MARTINS
Nomor Mahasiswa : 115201586/PS/MIH
Konsentrasi : HUKUM TATA NEGARA
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA/BURUH *OUTSOURCING* DI KOTA
YOGYAKARTA

Nama Pembimbing :

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

19/4-13

A anny Retnowati, SH., M.Hum

19/4-13



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN PENGUJI

Nama : MANUEL MARTINS
Nomor Mahasiswa : 115201586/PS/MIH
Konsentrasi : HUKUM TATA NEGARA
Judul Tesis : IMOLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA/BURUH *OUTSOURCING* DI KOTA
YOGYAKARTA

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. (Ketua)	22/4-13	
Anny Retnowati, S.H., M.Hum. (Sekretaris)	22/4-13	
G. Aryadi, S.H., M.H. (Anggota)	22/4-13	

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

KATA PENGATAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH *OUTSOURCING* DI KOTA YOGYAKARTA. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir dari perkuliahan di Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarja Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Banyak kesulitan dan hambatan yang penulis alami dalam menyusun tesis ini, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tesis ini akhirnya dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankanlah penulis pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, SH.,M.Hum dan Ibu Anny Retnowati, SH.,M.Hum selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk, bimbingan serta saran-saran yang sangat berharga sehingga terselesainya tesis ini dengan baik. Bapak G. Aryadi, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah menyempurnakan tesis kami sehingga menjadi sebuah bentuk tulisan ilmiah yang baik dan benar. Bapak Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Bapak Ibu pegawai administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu melayani kami selama ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, ingin kami sampaikan sembah sujud buat Bapak tercinta Rainaldo Martins dan Mama Leonia Moniz serta kakak dan adik tercinta,

serta yang teristimewa Agustina Maria Yoseva istriku tersayang dan ketiga buah hatiku, Arcenia Martins, Cerina Gracia Martins dan putra bungsuku Hugo Chavez Junior Martins, yang selalu menemani dan memberi dukungan serta doanya.

Sebagai manusia kami menyadari, tetap saja ada yang kurang dalam penyajian Tesis ini, baik secara substansi, metode penulisan maupun redaksionalnya, namun betapa indahnyanya apabila ada kesalahan-kesalahan kami diperhatikan dan diperbaiki oleh siapapun yang peduli.

Yogyakarta, 19 April 2013

Penulis

Manuel Martins

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH
OUTSOURCING
(STUDY KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)

Perusahaan sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah *anti-tesis* bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan) dan selalu muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*. Nyatanya kehidupan ekonomi dengan hegemoni kapitalis financial telah beroperasi melalui “*dissolution subject*” yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi, inilah yang terjadi dalam praktik *outsourcing* di Indonesia, sehingga legalisasi *outsourcing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menuai kontroversi. Bagi yang setuju beralih *outsourcing* bermanfaat dalam pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja baru. Bagi yang menolak beranggapan praktik *outsourcing* merupakan corak kapitalisme modern yang membawa kesengsaraan bagi pekerja/buruh.

Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah; bagaimana legalitas praktik *outsourcing* di Kota Yogyakarta?, bagaimanakah pengusaha memberikan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing*?, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* dan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing*. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis terhadap praktik *outsourcing*, mengetahui pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh, mengetahui pelaksanaan perlindungan hukumnya dan menganalisis upaya perlindungan hukum oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif

Analitis. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation*) serta penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Non Random Sampling* dengan metode *Purposive Sampling*.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi pelanggaran syarat-syarat *outsourcing* di Kota Yogyakarta, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing* tidak diberikan oleh pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkendala karena adanya kelemahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya.

Oleh karena itu, perlu revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pemerintah Kota Yogyakarta perlu menambah jumlah personel pegawai pengawas ketenagakerjaan, menyediakan sarana dan fasilitas serta anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal serta memberdayakan Serikat Pekerja/Buruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik.

Kata Kunci: Pekerja/Buruh *Outsourcing*, Eksploitasi, dan Perlindungan Hukum

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR WORKERS/LABOR
OUTSOURCING
(CASE STUDY IN YOGYAKARTA CITY)

Company as a symbol of the dominant economic system, became inherently clear, structure and function is anti-thesis to the legal protection of workers/laborers, both contradictory, always found the gap between *das sollen* (should be) and *das science* (reality) and always appear discrepancy between the law in the books and law in action. In fact the economic life of the financial capitalist hegemony has been operating through the "dis-solution subject" who *tidakmemandang* workers/laborers as production subject that should be protected, but rather as an object that can be exploited, this is what happens in the practice of outsourcing in Indonesia, so legalization outsourcing pursuant Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower controversy. For those who disagree argue useful in outsourced business development and create new jobs. For those who refused to believe the practice of outsourcing is a modern style of capitalism that brought misery to the workers/laborers.

Based on the fact that the authors formulate the problem, how the legality of the practice of outsourcing in Yogyakarta?, How employers provide employment protection and working conditions for workers/laborers outsourcing?, How legal protection for workers/laborers outsourcing and what efforts should be made by the Government Yogyakarta city to provide legal protection for workers/laborers outsourcing. The aim is to conduct an analysis of the practice of outsourcing, knowing the implementation of job protection and working conditions for workers/laborers, knowing and analyzing the implementation of the legal protection of the laws by the government's efforts to protect the city of Yogyakarta.

To answer the problems and research objectives, juridical approach used empirical/sociological research Descriptive Analytical specifications. Data types include Primary Data and Secondary Data collected through library research and

documentation (library and documentation) as well as field research (field research), while the sampling was done by using non-random sampling with purposive sampling method.

From the discussion, note that the legality of many violations of outsourcing in terms of the city of Yogyakarta, employment protection and working conditions for workers/laborers outsourcing is not given by the employer to the fullest, while legal protection for workers/laborers are constrained because of the weaknesses in the system employment law, good substance, structure and culture.

Therefore, it is necessary revision of labor legislation, the government needs to increase the number of Yogyakarta City personnel labor inspectors, provide facilities and an adequate budget for the operation of the labor inspection in order to carry out its duties and functions to the fullest and to empower Union/workers to be able to carry out the purposes and functions well.

Keywords: Labor/Labor Outsourcing, Exploitation, and Protection Laws

REKOMENDASI

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing*, maka pemerintah Kota Yogyakarta melalui unit kerja terkait harus segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memerintahkan pimpinan perusahaan (*Principal*) untuk menjalin hubungan kerja dengan pekerja/buruh *outsourcing* dan bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak pekerja/buruh itu, apabila ditemukan kasus praktik *outsourcing* yang melibatkan *vendor-vendor* tidak berbadan hukum seperti CV, dan/atau *vendor* yang tidak memberikan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja sesuai dengan standard peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memerintahkan kepada *principal* untuk turut serta bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak pekerja/buruh *outsourcing* apabila terjadi risiko kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja di lingkungan kerja perusahaan (*Principal*) baik yang disebabkan oleh kesengajaan atau karena kelalaiannya menjaga keamanan dan kesehatan lingkungan kerja di perusahaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
REKOMENDASI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II. : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Pemikiran.....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Pekerja/Buruh.....	38
C. Tinjauan Umum Mengenai <i>Outsourcing</i>	43
1. Pengaturan <i>Outsourcing</i>	43
2. Makna <i>Outsourcing</i>	48
3. Manfaat <i>Outsourcing</i>	51

4. Kompleksitas <i>Outsourcing</i>	55
D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Kerjadan Syarat-Syarat Kerja.....	59
E. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	64
1. Makna Perlindungan Hukum.....	64
2. Makna Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.....	73
3. Penegakan Hukum.....	75
BAB III. : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	88
B. Sumber Data.....	89
C. Metode Pengumpulan Data.....	90
D. Metode Pendekatan.....	90
E. Analisis Data.....	91
BAB IV. : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta.....	92
1. Masalah Pengangguran dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan.....	94
2. Masalah Pembinaan Hubungan Industrial.....	95
3. Masalah Ketersediaan dan Kesiapan Aparatur.....	96
4. Pelanggaran Atas Ketentuandan Syarat-Syarat <i>Outsourcing</i> di Kota Yogyakarta.....	100
B. Implementasi Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Praktik <i>Outsourcing</i> di Kota Yogyakarta.....	103
1. Kontraktual.....	103
2. Unsur Esensialia (<i>Essential Elements</i>) Kontrak <i>Outsourcing</i>	108

3. Unsur <i>Naturalia</i> (<i>Natural Elements</i>) Kontrak <i>Outsourcing</i>	109
4. Unsur <i>Aksidentalia</i> (<i>Accidental Elements</i>) Kontrak <i>Outsourcing</i>	110
5. Ketentuandan Syarat Berbadan Hukum.....	112
6. Syarat-Syarat Pekerjaan yang Boleh di- <i>Outsource</i>	121
C. Pelaksanaan Perlindungan Kerjadan Syarat-Syarat Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i>	126
.....	
1. Perlindungan Kerjadan Syarat Kerja.....	129
2. Penerapan Norma Kerja.....	136
3. Penerapan Norma Pengupahan.....	143
4. Penerapan Persyaratan Hubungan Kerja.....	152
5. Penerapan Persyaratan Jamsostek.....	161
6. Penerapan Konpensasi Kecelakaan Kerja.....	163
7. Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	167
D. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i>	172
.....	
1. Perlindungan Hak-Hak Dasar Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i>	174
2. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.....	179
3. Kepincangan Komponen Struktur Hukum Ketenagakerjaan.....	192
4. Peningkatan Fungsi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.....	198
5. Pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	206

BAB V. : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	215
--------------------	-----

B. Saran-Saran..... 216

DAFTAR PUSTAKA.....

